

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana telah ditunjukkan pada subbab 4.9, sebelum menyimpulkan secara tegas bahwa upaya peningkatan daya saing tidak mengubah posisi komparatif Indonesia secara substansial, penting untuk menegaskan kembali bahwa kesimpulan ini bukan diambil dengan mengabaikan data peningkatan parsial yang juga ditemukan dalam penelitian ini, melainkan dengan mempertimbangkannya secara eksplisit sebagai bagian dari evaluasi yang utuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri tekstil terhadap Vietnam untuk pasar ekspor Amerika Serikat pada periode 2018 hingga 2022 menghasilkan perbaikan yang bersifat parsial, tidak sistemik, dan tidak cukup mengubah posisi komparatif Indonesia secara substansial. Evaluasi berbasis kerangka Diamond Model Porter (1990) terhadap data dokumentasi kebijakan dan perspektif langsung pelaku industri mengungkap bahwa dari kelima dimensi yang dianalisis, hanya dimensi D1 kondisi faktor produksi yang menunjukkan intervensi konkret melalui Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, sementara dimensi D3 industri terkait dan pendukung berada dalam kondisi paling kritis yang ditandai oleh ketidakmampuan industri kain domestik untuk bersaing dari sisi harga 25 hingga 35 persen lebih mahal, konsistensi kualitas, maupun kecepatan respons terhadap tren dibandingkan produk impor Tiongkok. Kondisi ini dibuktikan secara kuantitatif oleh data distribusi lapangan yang menunjukkan 60 hingga 65 persen pelanggan industri garmen meningkatkan porsi pembelian bahan baku impor selama periode penelitian, tidak ada satu pun yang bergerak ke arah sebaliknya, serta oleh data makro BPS (2024) yang mencatat hilangnya 146.000 lapangan kerja dan turunnya utilisasi kapasitas dari 82 persen menjadi di bawah 50 persen, di tengah pangsa ekspor garmen yang stagnan di kisaran 4 hingga 5 persen di pasar Amerika Serikat sementara Vietnam melonjak dari 12 persen menjadi lebih dari 17 persen dalam periode yang sama berdasarkan data UN Comtrade (2023). Pengakuan atas adanya pemulihan parsial pada tingkat utilisasi kapasitas pasca- titik terendah pandemi, sebagaimana telah diuraikan

secara rinci pada subbab 4.9 berdasarkan data AGTI yang menunjukkan kenaikan dari kisaran 40-45 persen pada 2020- 2021 menuju kisaran 70 persen pada 2022, tidak mengubah kesimpulan ini, karena tingkat tersebut tetap jauh di bawah level pra-2018 sebesar 82 persen dan tidak disertai perbaikan posisi komparatif Indonesia terhadap Vietnam yang justru terus melebar pada periode yang sama. Temuan orisinal penelitian ini adalah identifikasi inkohherensi kebijakan antara Kemenperin dan Kemendag sebagai kegagalan dimensi D5 yang bersifat sistemik dan menginfeksi seluruh dimensi lain dalam Diamond Model. Kemenperin mendorong penggunaan bahan baku lokal melalui program modernisasi sementara Kemendag secara bersamaan melonggarkan ketentuan impor tekstil, menghasilkan dua sinyal kebijakan yang berlawanan kepada satu industri tanpa mekanisme rekonsiliasi di tingkat manapun. Kontradiksi ini bukan sekadar inkonsistensi teknis melainkan cerminan dari absennya strategi industrialisasi tekstil yang koheren dan terkoordinasi lintas kementerian. Evaluasi menggunakan kerangka industrialisasi dari List (1841), Chang (2002), dan Szirmai (2012) memperkuat kesimpulan ini. PRMT memenuhi kriteria intervensi industrial yang sah namun hanya menghasilkan upgrading parsial karena komponen transfer kapabilitas tidak dirancang secara komprehensif, sehingga ia lebih tepat dikategorikan sebagai proteksi yang disertai upgrading parsial daripada industrialisasi berkelanjutan dalam pengertian Chang. Kebijakan safeguard sepenuhnya masuk kategori proteksi tanpa upgrading karena tidak disertai program peningkatan kapabilitas yang paralel, menjadikannya persis contoh yang oleh Chang disebut sebagai kebijakan yang menunda kekalahan tanpa mencegahnya. Program pelatihan tenaga kerja gagal memenuhi kriteria Szirmai tentang learning by doing yang efektif karena tidak dirancang dengan keterlibatan industri dan tidak menghasilkan peningkatan kapabilitas yang terukur dan transferable. Adapun adaptasi dimensi D4 yang terbukti berhasil oleh pelaku industri terjadi sepenuhnya melalui logika bisnis mandiri di luar orbit kebijakan, mengindikasikan bahwa lingkungan kebijakan tidak mampu berfungsi sebagai panduan strategis yang dapat diandalkan oleh pelaku industri dalam membuat keputusan investasi jangka menengah.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kemenperin dan Kemendag, pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian yang memiliki mandat hukum eksplisit dan kewenangan untuk merekonsiliasi arah kebijakan sebelum regulasi diterbitkan merupakan prasyarat struktural yang tidak dapat ditunda. Koordinasi yang dimaksud bukan forum konsultasi tambahan yang bersifat sukarela, melainkan mekanisme formal dengan kemampuan menghentikan kebijakan yang bertentangan dengan strategi industrialisasi tekstil nasional yang telah disepakati bersama, disertai sistem notifikasi dini kepada pelaku industri untuk setiap perubahan regulasi impor yang sedang dibahas dengan masa transisi minimal tiga hingga enam bulan sebelum pemberlakuan. Sejalan dengan itu, PRMT perlu ditransformasi dari program subsidi mesin menjadi program industrialisasi terintegrasi yang mewajibkan komponen upgrading kapabilitas operator sebagai syarat penerimaan manfaat, bukan sebagai tambahan opsional, dengan kurikulum pelatihan yang dirancang secara partisipatif bersama asosiasi industri tekstil dan mencerminkan standar buyer-specific yang sesungguhnya dihadapi di rantai produksi. Persyaratan administratif PRMT juga perlu disederhanakan secara signifikan agar dapat diakses oleh perusahaan garmen berskala menengah dan kecil yang merupakan segmen penyerap tenaga kerja terbesar namun justru paling terkecualikan dari program yang ada.

Menghadapi tekanan yang akan semakin berat seiring penurunan tarif RCEP menuju nol persen antara 2025 dan 2030, pemerintah perlu segera meluncurkan program peningkatan daya saing industri kain nasional yang dirancang khusus dengan komponen insentif berbasis hasil bagi produsen kain domestik yang berhasil mencapai paritas harga dan kualitas pada segmen tertentu, investasi dalam infrastruktur pengujian dan sertifikasi kain untuk mengatasi hambatan inkonsistensi kualitas yang teridentifikasi sebagai faktor utama perpindahan pelanggan, serta fasilitasi pengembangan kapasitas produksi kain fungsional dan teknis yang saat ini sepenuhnya bergantung pada impor. Bagi Kemendag secara spesifik, pembentukan Pusat Layanan Teknis Ekspor yang menyediakan pendampingan teknis pemenuhan Rules of Origin untuk pengusaha skala menengah merupakan intervensi berbiaya

rendah yang dapat memberikan dampak segera, mengingat hambatan ROO yang teridentifikasi bersifat teknis bukan kapabilitas produksi sehingga dapat dieliminasi melalui pendampingan yang tepat sasaran tanpa memerlukan transformasi struktural yang memakan waktu. Bagi pelaku industri tekstil, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa repositioning ke segmen produk bernilai tambah tinggi dengan keahlian jahit kompleks yang tidak dapat direplikasi oleh produksi massal volume tinggi merupakan strategi bertahan yang paling realistis dalam jangka menengah, mengingat keterbatasan skala produksi yang bersifat struktural tidak dapat diperbaiki melalui kebijakan jangka pendek apapun. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan studi komparatif yang secara sistematis membandingkan desain kelembagaan koordinasi kebijakan industri tekstil di Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh untuk mengidentifikasi faktor institusional spesifik yang menjelaskan perbedaan outcomes kompetitif yang sangat mencolok, serta kajian dampak kuantitatif yang mengukur kontribusi PRMT terhadap produktivitas perusahaan penerima manfaat dibandingkan dengan kelompok kontrol untuk memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi keputusan tentang transformasi program tersebut. Penelitian lanjutan juga perlu mengupayakan wawancara langsung dengan pejabat Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, guna memvalidasi secara langsung interpretasi tentang inkoherensi kebijakan D5 yang dalam penelitian ini masih bersandar pada analisis dokumen dan triangulasi tidak langsung melalui asosiasi industri.